

PENGARUH KUALITAS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA), AKURASI PERENCANAAN KAS, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA KABUPATEN PONOROGO

Ilyana Khansa

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email korespondensi: ilyanakhansa21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of Budget Implementation Document (DPA) Quality, Cash Planning Accuracy, and Human Resources Quality on budget absorption in Ponorogo Regency. This research uses quantitative descriptive method. The population in this study were 46 Regional Apparatus Organisations in Ponorogo Regency. Sampling using total sampling technique. The data used is primary data. The data was obtained by distributing questionnaires directly by visiting the OPD one by one. This study uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 25 application. The results of this study indicate that the first hypothesis that the quality of DPA affects budget absorption. The second hypothesis shows that cash planning accuracy affects budget absorption. The results of the third hypothesis show that the quality of human resources affects budget absorption. And the results of the fourth hypothesis show that the quality of DPA, cash planning accuracy, and the quality of human resources have a simultaneous effect on budget absorption.

Keywords: *DPA Quality, Cash Planning Accuracy, Human Resource Quality, Budget Absorption*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Akurasi Perencanaan Kas, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap penyerapan anggaran pada Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 46 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung dengan mendatangi OPD satu persatu. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama kualitas DPA berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa akurasi perencanaan kas berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dan hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh simultan terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: Kualitas DPA, Akurasi Perencanaan Kas, Kualitas SDM, Penyerapan Anggaran

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memiliki peranan penting terhadap pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di wilayahnya sendiri dengan maksud guna mensejahterahkan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam menjalankan fungsi otonomi daerah, ada salah satu elemen yang memerlukan pengaturan yang tegas pemerintah yaitu aspek alokasi dana serta mekanisme pengaturannya (Mardiasmo, 2018). Menurut Suparmoko (2002), APBD menunjukkan kemampuan keuangan daerah. APBD mempertimbangkan semua potensi daerah yang ada saat penyusunan anggaran sehingga formulasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan obyektif daerah. Menurut Afifah (2023), peran APBD sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Penilaian terhadap kinerja pada aspek implementasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program serta tingkat pencapaian output yang dihasilkan. Indikator dalam evaluasi ini mencakup tingkat penyerapan anggaran, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, capaian output, serta tingkat efisiensi.

Penyerapan anggaran memiliki peran penting sebagai pendorong utama untuk melajukan pertumbuhan perekonomian. Oleh karenanya, pemerintah harus berusaha agar pemanfaatan serapan anggaran bisa dilakukan secara optimal. Ginting (2024) menyatakan bahwa ketika anggaran yang dialokasikan diserap secara optimal maka program pembangunan pada pemerintah dinyatakan berhasil secara efektif dan efisien. Menurut Diko et al. (2023), penyerapan anggaran pada suatu pemerintah dinyatakan baik jika derajat pencapaian pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan fisik yang sejalan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Merujuk pada laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2020–2023, persentase realisasi belanja pada tahun 2020 sebesar 90,14%. Lalu untuk serapan anggaran belanja tahun 2021 menurun menjadi 86,39%. Pada tahun 2022 serapan anggaran belanjanya sebesar 91,56%. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat pesat menjadi 97,19%. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian realisasi anggaran belanja daerah 2020-2023:

Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2023

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian
2020	2.472.217.012.181	2.228.535.472.522	90,14%
2021	2.445.506.571.924	2.112.615.148.768	86,39%
2022	2.714.831.019.713	2.485.618.093.967	91,56%
2023	2.557.282.310.196	2.485.516.805.192	97,19%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2023, data diolah

Melihat dari ketercapaian serapan anggaran Kabupaten Ponorogo yang baik, menjadi daya tarik dari peneliti untuk mengetahui atau menilai secara lebih mendalam, perlu dikaji faktor-faktor yang bisa meningkatkan penyerapan anggaran di Kabupaten Ponorogo. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang komponen yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu Kholid (2021); Ihsan & Kuntadi (2023); dan Kennedy et al. (2020). Hasil penelitian Kholid (2021) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada pemerintah pusat dipengaruhi oleh kualitas DIPA. Sedangkan Ihsan & Kuntadi (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang memiliki mutu tinggi, serta didukung oleh perencanaan kas yang tepat. Selain itu, pada penelitian Kennedy et al. (2020) menunjukkan penyerapan anggaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh perencanaan keuangan, kompetensi SDM, tingkat komitmen, struktur organisasi, tata kelola administrasi, serta mekanisme pengawasan internal.

Istilah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diterapkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2005, ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Tata Kelola Keuangan Daerah. Di pemerintahan daerah, DPA sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Faqih (2020) menyatakan bahwa DPA digunakan sebagai instrumen untuk pengendalian, pelaksanaan program, penyusunan laporan, monitoring, serta sistem akuntansi di lingkungan pemerintahan. Menurut Suwito (2018), DPA yang berkualitas yaitu DPA yang tidak ada kesalahan dan tidak perlu direvisi. DPA yang berkualitas memberikan dampak yang cukup besar terhadap realisasi anggaran. Dalam penyusunan DPA pasti ada kendala yang mengharuskan proses revisi DPA. Kesalahan dalam merancang dan menyusun anggaran menyebabkan revisi DPA. Akibatnya realisasi kegiatan dan program pemerintahan harus menunggu pengesahan revisi DPA terlebih dahulu sehingga penyerapan anggaran menjadi kurang maksimal.

Selain efektivitas penyerapan anggaran ditentukan oleh kualitas DPA dan akurasi perencanaan kas dalam menyusun rencana penarikan dana. Perencanaan kas yang akurat adalah salah satu bagian penting dari penyerapan anggaran. Perencanaan kas yang akurat dan realistis memungkinkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aliran dana tersedia sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan atau program yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Supriyanto (2024) selaku Kepala Subbagian Umum – KPPN Watampone dalam berita Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI (<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/>) yang menyatakan bahwa perencanaan kas yang akurat memastikan bahwa pemerintah memiliki prediksi yang tepat terkait arus kas masuk dan keluar. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat mengelola likuiditas secara efektif, menghindari kesenjangan kas, dan memastikan bahwa pembayaran untuk pengeluaran rutin maupun proyek strategis dapat dilakukan tepat waktu. Ketika perencanaan kas tidak akurat, risiko terjadinya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran meningkat, yang dapat mengganggu stabilitas APBD.

Penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian Kholid (2021) melalui model persamaan yang melibatkan seluruh variabel yaitu variabel kualitas DPA dan akurasi perencanaan kas. Perbedaan penelitian yaitu menambahkan variabel independen kualitas sumber daya manusia sesuai dengan saran penelitian Kholid (2021). Menurut Faizi et al. (2022) kualitas sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang terlibat dalam realisasi tujuan organisasi dipengaruhi oleh kompetensi keterampilan, yang salah satunya ditentukan oleh jenjang pendidikan individu, pengalaman, kejujuran. Alasan penambahan

variabel tersebut karena dalam peningkatan serapan anggaran pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pegawai OPD yang berkontribusi dalam pengelolaan dan penyerapan APBD terdiri dari Pejabat yang mengemban tugas pokok dalam hal pemanfaatan anggaran dan pengurusan administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan teknis, serta pengeluaran dana. Dalam proses pengelolaan dan penyerapan APBD perlu disertai dengan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian ini menggabungkan beberapa variable independent yaitu kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia dengan objek penelitian di OPD Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Kabupaten Ponorogo”.

KERANGKA TEORI

Teori Stakeholder

Menurut Ghozali & Chariri (2014) pada *stakeholder theory*, perusahaan tidak semata-mata beroperasi untuk kepentingan internalnya saja, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pihak kreditor, pelanggan, pemasok, analis, tenaga kerja, pemerintah, serta masyarakat luas. Teori stakeholder dalam konteks pemerintahan daerah menyoroti bahwa pemerintah daerah tidak hanya melayani satu kelompok kepentingan, melainkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) diantaranya berupa masyarakat, pengusaha, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), partai politik, dan pemerintahan pusat.

Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran merupakan bentuk aktualisasi dari perencanaan keuangan yang ditargetkan untuk diwujudkan dalam masa waktu tertentu, yang tercemin dari pelaksanaan anggaran. Pada lingkup pemerintahan, penyerapan anggaran mengacu pada belanja negara atau daerah yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022, telah ditetapkan pedoman teknis dalam melakukan penilaian terhadap penunjuk performa pelaksanaan perkiraan belanja pada kementerian dan lembaga pemerintah, tingkat penyerapan anggaran dikategorikan baik jika mencapai minimal 95% dari keseluruhan anggaran yang sudah diputuskan.

Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

DPA ialah dokumen berisi rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan menjadi acuan bagi pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan anggaran sesuai ketentuan (PP No. 12 Tahun 2019). Tujuan utama dari DPA yaitu untuk memberikan petunjuk yang lebih rinci dan operasional terkait alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. Menurut Ihsan & Kuntadi (2023), DPA yang berkualitas memiliki kriteria, diantaranya yaitu: ketepatan dalam penerimaan DPA, tidak terdapat kekeliruan, tidak adanya revisi, tidak adanya tanda bintang.

Akurasi Perencanaan Kas

Seftianova & Adam (2013) menyatakan bahwa perencanaan kas yang akurat merupakan derajat kecocokan antara proyeksi kas dan kas yang terealisasi. Perencanaan kas

merupakan bagian dari pengelolaan kas yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan kas di masa depan dan memastikan bahwa kas diberikan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara optimal.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Faizi et al. (2022) mengatakan kualitas sumber daya manusia mencerminkan individu dalam suatu organisasi yang turut berkontribusi dalam mencapai target organisasi, dengan keahlian yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kejujuran, dan pengalaman kerja. Dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keberadaan SDM yang kompeten sangat diperlukan untuk menangani serta mengelola berbagai program pemerintahan secara efektif. Program-program pemerintahan akan berjalan secara lancar jika dibantu oleh pengelolaan anggaran yang tepat.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kualitas DPA Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian Faqih (2020) serta penelitian Suwito (2018) menunjukkan bahwa kualitas DPA mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kholid (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas DPA tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₁: Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

H_{a1}: Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian Kholid (2021) serta penelitian Maspaitela et al. (2024) menunjukkan bagaimana ketepatan persiapan kas mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Seftianova & Adam (2013) Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak terpengaruh oleh ketepatan penganggaran keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₂: Akurasi Perencanaan Kas tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

H_{a2}: Akurasi Perencanaan Kas berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan penelitian Ramdhani & Anisa (2017) serta penelitian Gustavo Puluala (2021) menunjukkan bahwa kualitas SDM mempengaruhi penyerapan anggaran. Namun tidak sejalan dengan hasil studi Alfarisi & Nugroho (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₀₃: Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Penyerapan anggaran

H_{a3}: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran

Pengaruh Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ,Akurasi Perencanaan Kas, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran seperti kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₀₄: Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ,akurasi perencanaan kas, dan

kualitas sumber daya manusia secara simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H_{a4}: Kualitas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

METODE

Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memilih OPD di Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil pengumpulan kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisisioner secara langsung kepada seluruh responden di masing-masing instansi OPD Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

Populasi dan Sampel

Menurut Riyanto & Hatmawan (2020), populasi merupakan total objek yang beralih pemusatan dalam suatu penelitian. Pada penelitian yang diteliti, populasi yang dipakai mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo. Jumlah OPD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yaitu 46 yang tersusun dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 dinas, 5 badan daerah, dan 21 kecamatan. Riyanto & Hatmawan (2020), menyatakan bahwa definisi sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat menyampaikan uraian serta mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. Berdasarkan jumlah OPD, penelitian ini akan menggunakan *total sampling*, sehingga 46 OPD menjadi sampel penelitian. Adapun responden penelitian ini dilakukan dengan metode klaster yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pejabat yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran meliputi Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran sehingga masing-masing OPD akan diambil 4 orang sebagai responden, maka total responden sebanyak 184 responden.

METODE

Pengaruh Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis pertama dalam penelitian ini mengenai pengaruh kualitas DPA terhadap penyerapan anggaran. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kualitas DPA sebesar 0,436. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas DPA dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang lebih optimal. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,078 > 1,975$) dan berada pada daerah penolakan H_0 dengan nilai signifikansinya $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima sehingga ditetapkan bahwa kualitas DPA berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

DPA yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memenuhi kebutuhan program dan kegiatan, serta mudah dipahami dan sesuai regulasi yang berlaku. DPA yang tidak bermasalah sangat dibutuhkan sehingga meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan dan memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat waktu dan lebih optimal. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, teori *stakeholder* sesuai dengan hasil penelitian. Dilihat dari DPA yang berkualitas membantu memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai benar-benar memberikan manfaat yang terukur dan sesuai dengan tujuan pembangunan dengan hasil yang bisa dirasakan untuk *stakeholder*, terutama masyarakat.

Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengenai pengaruh akurasi perencanaan kas terhadap penyerapan anggaran. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel akurasi perencanaan kas sebesar 0,725. Ini berarti bahwa perencanaan kas yang akurat dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang lebih optimal. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($8,534 > 1,975$) dan berada pada daerah penolakan H_0 dengan nilai signifikansinya $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga ditetapkan bahwa akurasi perencanaan kas berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Proses perencanaan kas melibatkan seluruh pihak kepentingan yang relevan dengan program OPD. Lebih lanjut, perencanaan kas tersebut telah didukung oleh data yang valid serta instrumen yang berhubungan dengan program terkait, yang secara kumulatif berkontribusi pada peningkatan akurasi perencanaan kas. Akurasi perencanaan kas ini mampu merealisasikan penyerapan anggaran yang sesuai dengan implementasi anggaran. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, teori *stakeholder* sesuai dengan hasil penelitian. Perencanaan kas yang akurat memungkinkan pemerintah mengelola anggaran secara efektif, menghindari kesenjangan kas, dan memastikan bahwa dana tersedia saat dibutuhkan. Hal ini berarti program-program pemerintah dapat berjalan lancar tanpa penundaan akibat kekurangan dana. Hal ini secara langsung dapat memberikan manfaat program dan proyek pemerintah kepada *stakeholder*.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kualitas sumber daya manusia sebesar -0,084. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada penyerapan anggaran yang lebih optimal. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai -t hitung lebih kecil dari -t tabel ($-2,025 < -1,975$) dan berada pada daerah penolakan H_0 dengan nilai signifikansinya $0.045 < 0.05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga ditetapkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Sumber daya manusia berkualitas yang berkerja di bidang pengelolaan keuangan daerah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, memiliki pengetahuan dasar-dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, memiliki pengalaman di bidang akuntansi serta memiliki keterampilan dalam menyusun dan menganalisis anggaran OPD. Berdasarkan hasil penelitian ini, teori *stakeholder* sesuai dengan hasil penelitian. Sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan

keuangan mampu merespons kebutuhan dan harapan dari *stakeholder*. Hasilnya, penyerapan anggaran menjadi lebih tinggi dan efektif serta meningkatkan legitimasi pemerintah di mata *stakeholder*.

Pengaruh kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menguji pengaruh kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai F hitung 133,947 dengan nilai F tabel 2,66 ($df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = n-k = 162-4 = 158$). Oleh karena itu, nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($133,947 > 2,66$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain secara simultan kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dilihat dari DPA yang disusun dengan baik, maka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat berjalan lancar serta anggaran dapat diserap secara optimal. Perencanaan kas yang akurat mempermudah satuan kerja untuk mengantisipasi kebutuhan dana dan menghindari kekuarangan atau kelebihan dana sehingga proses penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal. SDM yang berkualitas mampu mengelola anggaran dengan lebih baik. Satuan kerja dapat membuat keputusan yang tepat, mengatasi kendala yang timbul, dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Kualitas DPA memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut bermakna bahwa kualitas DPA yang baik dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan memastikan program pemerintah Kabupaten Ponorogo berjalan sesuai target. Akurasi perencanaan kas memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut bermakna perencanaan kas yang akurat dapat menjamin ketersediaan dana untuk kegiatan pemerintah di Kabupaten Ponorogo sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih optimal. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal tersebut bermakna semakin berkualitas sumber daya manusia mampu mendorong efisiensi dalam penggunaan dana pemerintah sehingga penyerapan anggaran di Kabupaten Ponorogo lebih optimal. Kualitas DPA, akurasi perencanaan kas, dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. (2023). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perolehan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan (Kantor Walikota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis [JIMEIS]*, 3, 520–530. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimeis>
- Alfarisi, S., & Nugroho, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)*, 10(1), 22–37.

- Diko, N. A. R., Hiola, Y., & Radjak, L. I. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 497–503. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- Faizi, A., Josiah, T., & Parela, E. (2022). Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Provinsi Lampung. *Dikombis : Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(3), 415–424. <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i3.1823>
- Faqih, M. H. (2020). Pengaruh Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Resor Kendal, Sektor Plantungan Tahun Anggaran 2018). Skripsi. Universitas Wahid Hasyim Semarang. <http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/3458>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, B. M. (2024). Analisis Anggaran Dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang. Skripsi. Universitas Islam Sumatera Utara. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3351>
- Gustavo Puluala, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.5>
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta. Salemba Empat.
- Ihsan, M., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Kualitas Perencanaan, DIPA yang Berkualitas, dan Perencanaan Kas yang Akurat. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1–2, 323–334. <https://ciptakindpublisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/43/32>
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Kholid, M. I. (2021). Pengaruh Kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12402>
- Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2020-2023 Kabupaten Ponorogo
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (3rd ed.). Yogyakarta. Andi.
- Maspaitela, A. L., Hendra, J., & Dhany, U. R. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Tingkat Serapan Anggaran Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo. *JUMAD : Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 2(1), 141–150. <https://doi.org/10.51747/jumad.v2i1.1552>
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan

Daerah

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta. Deepublish.
- Seftianova, R., & Adam, H. (2013). Pengaruh Kualitas Dipa Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran Pada Satker Wilayah Kppn Malang. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 75–84. <https://doi.org/10.33558/jrak.v4i1.232>
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Supriyanto, B. E. (2024). Pengaruh Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Stabilitas APBN. *Djpb.Kemenkeu.Go.Id*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3707-pengaruh-akurasi-perencanaan-kas-terhadap-stabilitas-apbn.html>
- Suwito, H. (2018). Pengaruh Kualitas Dipa Dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan(Jak)*, 23, 1. <http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah